

## Abstrak

Era globalisasi yang menuntut adanya *good governance* melahirkan paradigma baru dalam pemerintahan yaitu otonomi daerah. Salah satu langkah untuk mewujudkan *good governance* dalam kaitannya dengan otonomi daerah adalah reformasi keuangan negara. Untuk mendukung reformasi keuangan negara diperlukan perubahan-perubahan di bidang akuntansi pemerintahan. Perubahan di bidang akuntansi pemerintahan yang paling diinginkan adalah adanya Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

SAP terbit melalui PP 24/2005 pada pertengahan tahun anggaran 2005. Akibatnya, penyusunan dan penyajian laporan keuangan tahun anggaran 2005 menurut SAP akan mengalami kesulitan karena pada tahun 2005 dasar hukum yang dipakai pemerintah daerah dalam penyusunan dan penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan daerah adalah Kepmendagri 29/2002.

Penelitian ini mengkaji usaha Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menyajikan laporan keuangan daerah tahun anggaran 2006 sesuai SAP. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terlambat menyajikan laporan keuangan daerah sesuai dengan SAP. Seharusnya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyajikan laporan keuangan daerah sesuai dengan SAP pada tahun anggaran 2005 dengan cara melakukan konversi/penyesuaian laporan keuangan dari Kepmendagri 29/2002 ke PP 24/2005 tentang SAP. Konversi/penyesuaian laporan keuangan dari Kepmendagri 29/2002 ke PP 24/2005 tentang SAP mencakup beberapa hal yaitu, jenis laporan, struktur APBD terutama struktur belanja, klasifikasi aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas.

Proses penyajian laporan keuangan daerah sesuai SAP menghadapi berbagai kendala yang berasal dari faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal berasal dari peraturan perundang-undangan. Faktor internal berasal dari sumber daya manusia, komitmen dari pemerintah daerah, dan sifat resistensi terhadap perubahan.